



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UIW NTB

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDJARWO**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **200285**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.850.000.000

1. Tanah Seluas 5900 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.950.000.000
3. Tanah Seluas 7060 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 959.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 4.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
205.000.000
3. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 255.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 450.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.514.500.000
III. HUTANG	Rp.	249.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.265.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.